



Peran Agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun

Davit Hardiansyah Putra
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
davithp@gmail.com

Abstract: The formulation of the problem of this research is how the role of religion in the country according to Ibn Khaldun. This type of research is library research and the method used in this research is descriptive qualitative. This study shows that Ibn Khaldun divided the role of religion into three types, namely: 1. Religion as a unifier, religion became an important role in social and political life, namely the unifying factor and community solidier. If religion coexists with solidarity then it will contribute in realizing the integrity of political power. 2. Religion as a driver of success, the state and power can stand without religion, but it is religion that brings the state and power towards a better direction. 3. Religion as the legitimacy of the political system, religion is used as a legal basis that must be obeyed in carrying out politics or government. According to Ibn Khaldun, a government based on religion is more important because he thinks that this kind of government is the best. Without religion group unity is only based on a sense of natural unity (Ashabiyah) that is formed due to the similarity of tribes or family relations. The nature of this natural unity is relatively fragile and a religious foundation is needed as a basis for the group's sense. This is mainly because religion is able to guarantee group morality, virtue, distance individual malignancies and be able to become an adhesive tool for identity that keeps them away from social conflict.

Keyword: Government, Ibn Khaldun, Religion, and Country.

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran agama dalam negara menurut Ibnu Khaldun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun membagi peran agama menjadi tiga macam yaitu 1. Agama sebagai pemersatu, agama menjadi peran penting dalam kehidupan sosial politik yaitu faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat. Apabila agama berdampingan dengan solidaritas maka akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan integritas kekuasaan politik. 2. Agama sebagai pendorong keberhasilan, negara dan kekuasaan dapat berdiri tanpa agama, tetapi agamalah yang membawa negara dan kekuasaan itu kearah yang lebih baik. 3. Agama sebagai legitimasi sistem politik, agama dijadikan suatu landasan hukum yang harus ditaati dalam menjalankan perpolitikan atau pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun pemerintahan yang berdasarkan agama jauh lebih penting karena menurutnya pemerintahan seperti inilah yang terbaik. Tanpa agama kesatuan kelompok hanya didasarkan atas rasa kesatuan alamiah (Ashabiyah) yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan. Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif rapuh dan diperlukan fondasi agama sebagai sandaran atas rasa kelompok tersebut. Hal ini terutama karena agama mampu menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan individual dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial.

Keyword: Pemerintahan, Ibnu Khaldun, Agama, dan Negara.

Pendahuluan

Menurut Ibnu Khaldun terbentuknya negara adalah karena kekuatan pada suku dan rasa golongan. Rasa golongan atau ashabiyah itu mempunyai sifat-sifat dan bentukbentuknya yang tersendiri sesuai dengan keadaan mereka yang menguasainya. Agamapun mempunyai pengaruh dalam penguatan negara. Jika pertikaian terjadi dikalangan penguasa, maka negara pun lemah, cepat hancur dan musnah. Seperti halnya dengan negara, demikian juga kedaulatan mempunyai sifat-sifat tertentu, dan yang karakteristik sekali ialah pemborongan kebesaran, kemegahan, kemewahan dan kesenangan bagi dirinya sendiri. Ini adalah karakteristik yang jika terus berakar dengan kuatnya akan membawa negara kepada usia tua, lemah dan musnah.¹

Ia juga berpendapat bahwa adanya masyarakat, peradaban, dan negara tidak tergantung sepenuhnya akan adanya agama, tetapi agama justru sangat mempengaruhi pemikiran tentang manusia, masyarakat, dan negara. Ibnu Khaldun berupaya untuk menempatkan agama pada porsi yang sebenarnya, menurutnya agama dan negara saling memerlukan, melengkapi, dan hubungannya berlangsung secara timbal balik (symbiotic).² Berkaitan dengan hubungan agama dan negara bagi Ibnu Khaldun dalam suatu negara agama tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan

pembangunan suatu negara dan kerajaan. Ia merupakan kekuatan pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Tanpa Agama dan negara memiliki dasar pijakan pada kenyataan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya, agama adalah kabar gembira dan peringatan. Sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama. Negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.³

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun? Adapun tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk menjabarkan seperti apa peran agama dalam negara menurut Ibnu Khaldun. Secara teoritis kegunaan penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis dan setiap pelajar seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan hak kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi pancasila. Terkhususnya mengenai Peran agama dalam negara menurut Ibnu Khaldun. Secara praktis penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam menambah wawasan dan menambah cakrawala tentang Peran

¹ Osman Raliby, Masyarakat dan Negara, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) hlm. 45

² Syafiuddin, Negara Islam, hlm. 151

³ Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997)

agama dalam negara menurut Ibnu Khaldun. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi.

Jenis yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data dipakai pendekatan kajian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran para ahli yang tertulis dalam buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam hal ini, data yang diperlukan diambil dari karya Ibnu Khaldun terhadap yang sekaligus sebagai data primer, yaitu buku Muqaddimah Ibnu Khaldun dan didukung oleh karya-karya lain yang berhubungan dengan objek kajian ini yang sekaligus sebagai data sekunder diantaranya adalah : Negara Islam Menurut Ibnu Khaldun karya Syafiuddin, Sosiologi politik karya A.A Sahid Gatara, Islam dan Politik karangan Ahmad Syafii Maarif, Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiardjo, Masyarakat dan Negara karya Osman Raliby dan buku-buku yang lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

Dengan menganalisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dan deduktif dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian untuk memperbanyak kajian terhadap masalah yang diteliti, akan dikemukakan pendapat tokoh yang diangkat dalam penelitian ini maupun buku-buku yang karya orang lain yang menyoroti dari pemikiran Ibnu Khaldun.

Sebelumnya peneliti belum menemukan penelitian serupa. Memang sudah banyak penelitian dan karya Ibnu Khaldun yang dibukukan oleh orang-orang terdahulu baik di Indonesia sendiri ataupun di luar Indonesia, hanya saja

untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, maka peneliti akan mengupas salah satu karya seperti yang telah disebutkan di atas. Syafiuddin, Negara Islam : Konsep Ibnu Khaldun . Buku tersebut membahas tentang Negara Islam, perpolitikan kenegaraan Indonesia terutama. Skripsi Christy Fransisca dari STAIN Bengkulu dengan judul “Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Negara Modern” Dalam skripsi tersebut ia mengatakan bahwa syarat kepala negara menurut Ibnu Khaldun di antaranya : berilmu, adil, mempunyai kemampuan, sehat panca indera, dan berasal dari keturunan Quraisy. Skripsi Hanna Widayani dari IAIN Bengkulu “Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun” dalam skripsi tersebut berisi dalam kaitannya dengan teori Ashabiyah yang digagas oleh Ibnu Khaldun, bahwa Ashabiyah sebagai bentuk pengikat dalam proses berdirinya suatu pemerintahan dengan dukungan rakyat yang kuat dan semangat nilai-nilai Islam.

Pembahasan

1. Agama menurut Ibnu Khaldun

Apa yang nampaknya baru dalam pemikiran Ibn Khaldun bukanlah dalam hal keagamaan, tapi sikap dan pandangannya tentang masyarakat yang konsisten menggunakan pendekatan rasional. Namun ini tidak berarti bahwa Ibn Khaldun bukanlah seorang Pemikir Islam, terbukti dari sikap Ibn Khaldun yang memasukkan variable agama, selain ekonomi-politik dan

geografi sebagai determinisme gerakan dalam peradaban.⁴

Sathi" al-Husri menambahkan bahwa dalam masalah-masalah keagamaan jawaban yang diberikan oleh Ibn Khaldun selalu positif dan selalu dekat pada pandangan kaum salaf atau pendapat Ahl Sunnah yang berupaya mengembalikan segala sesuatu pada al-Qur"an atau sunnah. Karena itulah setiap kali mengemukakan suatu ide dan ketika mengakhiri pembahasannya ia selalu mengukuhkan ayat al-Qur"an atau hadits yang mendukung pendapatnya tersebut. Artinya dalam persoalan tersebut Ibnu Khaldun lebih mendahulukan keimanan dan menerima masalah tersebut dengan apa adanya, tanpa berusaha untuk merenungkan atau memikirkannya lebih jauh yang diyakini Ibnu Khaldun malah menjauhkan orang dari Tuhan. Sebab menurutnya semua masalah tersebut adalah persoalan yang masih samar dan keberadaanya di luar jangkauan pemahaman manusia.

Sedangkan tujuan manusia diciptakan Tuhan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum agama dan untuk menuju kebahagiaan di akhirat.⁵ Menurut Ibnu Khaldun keagamaan tumbuh dari kesadaran diri bukan semata-mata hasil dari pendidikan. Seperti dikutip dalam Muqaddimah, "Para sahabat yang menerapkan hukumhukum agama dan syari"at, tapi sedikitpun keteguhan jiwa mereka tidak berkurang, dan bahkan

bertambah kokoh. Kenyataan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pernyataan tersebut, sebab ketika kaum muslim menerima agama dan Nabi Muhammad semoga salawat tercurah kepadanya, kesadaran tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kesadaran itu tumbuh bukan sebagai hasil dari pendidikan yang sengaja diadakan atau dari pengajaran ilmiah."⁶

Manusia dalam pandangan Ibn Khaldun adalah aktor terpenting dalam membentuk gerakan peradaban sesuai dengan peranya sebagai khalifah Tuhan. Bahkan gerakan keagamaan tanpa didukung oleh solidaritas yang kuat tidak akan berhasil mencapai kekuasaan. Hanya suku yang kuat dan memiliki moralitas tinggi yang berhasil menggapai kekuasaan, sesuai misi Tuhan yang dibebankan padanya untuk menertibkan peradaban.⁷

Kekuasaan Tuhan di dunia tidak akan bertentangan dengan tabiat peradaban yang berjalan sesuai dengan hukum kausalitas. Perbuatannya manusia pada dasarnya adalah seperti kertas putih, yang fitrahnya dalam keadaan bersih tidak bernoda. Pengaruh yang datang kemudian dari tindakan dan kebiasaanyalah yang akan menentukan apakah karakter manusia baik ataukah jahat. Kalau yang datang terlebih dahulu adalah kebaikan maka jiwanya juga akan baik. Karakter, atau sifat asli seseorang sangat terkait erat dengan setting sosial-historis di mana

⁴ Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rofi „Usmani, (Bandung: Pustaka, 1987). hlm. 84

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. (Beirut: Dar al-Fiqr, 1951) hlm. 593

⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986). hlm. 148-149

⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*..., hlm. 194.

ia tumbuh dan belajar menjadi dewasa. Dengan agama seseorang kemungkinan besar akan bertindak baik dalam kehidupannya. Meski demikian, Ibn Khaldun tetap berpendirian bahwa menurut fitrahnya manusia lebih dekat pada kebaikan daripada kejahatan. Apa yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari itulah yang akan menentukan siapa dia dan bagaimana sifatnya.⁸ Pembahasan tentang pemikiran keagamaan menurut Ibnu Khaldun sangat perlu karena banyak aspek dalam pembahasan yang berkaitan dengan negara dalam perspektif politik Islam sering berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman Ibnu Khaldun tentang sumber-sumber ajaran Islam.

Dari berbagai karyanya, pemikiran keagamaan menurut Ibnu Khaldun meliputi berbagai bidang kajian, baik akidah, syariah, maupun muamalah. Walaupun sasaran utama kajian Ibnu Khaldun bukan tentang agama, hampir dalam semua pembahasannya, agama mendapat tempat dan memberikan warna yang dominan dalam berbagai bidang kajiannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek dan faktor yang turut berpengaruh terhadap Ibnu Khaldun baik lingkungan keluarga, pendidikan maupun situasi dan kondisi yang melatar belakangi hidup dan kehidupannya.⁹ Pokok-pokok pembahasan utama pemikiran keagamaan Ibnu Khaldun yang terasa penting dikemukakan dan

diharapkan memiliki korelasi dengan pemikiran politiknya antara lain sebagai berikut :

1. al-Qur'an dan Sunnah

Menurut Ibnu Khaldun, sebelum memulai kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah, seseorang haruslah membekali diri dengan ilmu Bahasa Arab sebab keberhasilan dan kebenaran pengkajian sangatlah tergantung dengan Bahasa Arab tersebut. Bagi Ibnu Khaldun, al-Qur'an dan Sunnah merupakan ilmu-ilmu naqliyah sehingga dalam memahaminya, baik melalui nash, ijma", maupun qiyas dibutuhkan ilmu bantu seperti tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ushul fiqh, juga ilmu kalam. Ilmu kalam dibutuhkan guna memberikan pembuktian terhadap persoalan-persoalan tertentu berdasarkan dalil-dalil logika.¹⁰ Namun, tentang kebenaran dan keberadaan ilmu-ilmu naqliyah, menurut Ibnu Khaldun, pada prinsipnya agama memiliki ilmu tersebut. Akan tetapi, secara khusus ilmu-ilmu naqliyah dalam Islam merupakan penjelasan bagi agama-agama lain. Hal ini disebabkan Islam mengganti dan menyempurnakan agama-agama tersebut.

Dalam kaitannya dengan AlQuran, Ibnu Khaldun memberikan definisi tentang al-Qur'an sebagaimana yang lazim dipahami oleh umat muslim. Mengenai ayat yang menghapus (nasikh) dan ayat yang dihapus (mansukh) dari berbagai ayat Al-Quran setidaknya terdapat tiga pendapat yang berkembang dikalangan ulama. Pertama, golongan yang menolak sama sekali golongan nasikh dan mansukh secara menyeluruh terhadap sebagian

⁸ Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun..., hlm. 147.

⁹ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, (Yogyakarta : Gema Media, 2007). hlm. 55-56

¹⁰ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, hlm. 57-58

ayat-ayat alQur'an. Kedua, golongan yang menerima nasikh dan mansukh, sebagaimana pendapat yang dipegang teguh oleh sebagian besar ulama salaf. Ketiga, menerima pembatalan, tetapi tidak secara keseluruhan dengan mempertahankan gagasan spesifikasi (takhsish).

Di antara ketiga pendapat yang telah dikemukakan di atas, Ibnu Khaldun dapat dikelompokkan pada pendapat pada golongan kedua, yaitu golongan yang menerima nasikh dan mansukh.¹¹ Hal ini terlihat jelas dalam ungkapannya: Diantara ayat-ayat tersebut, ada ayat yang diturunkan terdahulu dan belakangan, sehingga ia menghapus hukum yang sebelumnya. Nabi Muhammad saw. menerangkan ayat yang bersifat umum dan membedakan ayat yang menghapus (nasikh) dari ayat yang dihapus (mansukh). Dalam memulai urainya tentang hadis, permasalahan utama yang dibicarakan Ibnu Khaldun adalah tentang ilmu hadis yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh terhadap hadis, yang dimungkinkan oleh syariat guna menggantikan satu hukum dengan hukum yang baru. Ibnu Khaldun menerima nasikh dan mansukh dalam ilmu hadis sebagaimana halnya dengan sebagian ayat-ayat alQur'an, tetapi keberadaannya tidak sama. Nasikh dan mansukh yang terdapat dalam alQur'an kembali dalam tafsir-tafsirnya, sedangkan yang terdapat dalam hadis kembali kepada ilmu-ilmunya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Ibnu Khaldun, yang dinamakan hadis adalah pengetahuan terhadap syarat-

syarat dan berbagai istilah yang terdapat dalam tingkatan dan matan hadis tersebut.¹²

2. Ushul Fiqh

Mengenai ilmu ushul fiqh, Ibnu Khaldun menulis, "Ilmu ushul fiqh merupakan salah satu ilmu yang paling besar, amat penting dan sangat bermanfaat di antara ilmu-ilmu syariah. Ilmu-ilmu tersebut membahas dalil-dalil syar'i dari mana hukum agama dan kewajiban-kewajiban utama (taklif)".¹³ Setelah menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Islam di masa nabi dan perkembangan di masa sahabat dan jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum salaf dalam mempergunakan dalil-dalil syar'i, baik alQur'an maupun hadis, ia juga menjelaskan bagaimana pengertian dan proses terjadinya ijtihad, dan qiyas, terkait hal tersebut Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut : "Ijtihad menjadi sumber hukum setelah Alquran dan sunah. Tentunya konsensus tersebut hanya dilakukan berdasarkan sandaran dalil, di samping dalil yang menyatakan terhidarnya jamaah dari kesalahan. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar cakupan nash yang sudah tetap dimasukkan ke dalam peristiwa yang sudah ada dukungan nashnya dengan syarat dan kesamaan dari dua peristiwa tersebut".¹³

3. Ilmu Kalam (Teologi)

Ilmu kalam disebut juga dengan teologi Islam atau ilmu tauhid. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu tersebut membahas ajaran-ajaran dasar

¹¹ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, hlm. 60

¹² Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, hlm. 64

¹³ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadi Thoha., hlm. 544

dari suatu agama secara mendalam. Ajaran dasar tersebut terutama berhubungan dengan masalah keyakinan dan keimanan. “Inti akidah keimanan adalah tauhid, keesaan Tuhan. Ilmu ini mempergunakan bukti-bukti logis dan mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dalam dogma yang dianut kaum muslim pertama dan ortodoksi muslim, ahlussunnah.”¹⁴

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa kerajaan yang luas dan memiliki kedaulatan yang kuat didasarkan kepada agama, baik kenabian maupun seruan akan kebenaran. Sebabnya ialah karena kekuasaan hanya bisa diperoleh dengan kemenangan, sedang kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukan lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Maka hati umat manusia disatukan dan diragamkan bekat pertolongan Allah dan memeluk agama yang sama.

“Walau kamu memelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka”.¹⁵ Rahasiannya ialah bahwa apabila hati terpenggil untuk melakukan kebatilan dan cenderung kepada dunia, kecemburuan asli muncul dan perbedaan meluas. Apabila hati cenderung kepada kebenaran dan melepas dunia serta kebatilan, seta duduk kepada Allah, maka tujuan dan arahnya akan menyatu. Kecemburuan pun menjadi lenyap dan pertentangan berkurang banyaknya. Saling menolong dan membantu menjadi

lebih baik. Karenanya, daerah kekuasaan semakin meluas, dan kerajaan bertambah kuat. Dengan Allah kita memperoleh taufiq, tidak ada Tuhan selain Dia.

2. Negara Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, negara ialah suatu personifikasi kekuatan, yang berada di atas masyarakat dan kekuatan tersebut tidak menyatu dengan masyarakat. Tidak pada semua masyarakat terdapat negara, dan tidak semua masyarakat mampu mewujudkan suatu negara. Baginya, negara tidak mungkin tewujud kecuali pada tahapan tertentu dan hasil perkembangan suatu masyarakat. Negara dalam pandangan Ibn Khaldun merupakan sebuah tatanan politik yang berdiri atas dasar „ashabiyah atau kesatuan kelompok, penyerbuan serta kehendak untuk mewujudkan kekuasaan. Atas dasar itulah, Rahman Zainuddin merumuskan dua premis utama yang digunakan Ibn Khaldun dalam membangun konsep kenegaraanya. Pertama, timbulnya negara sangat terkait erat dengan masalah kesukuan dan solidaritas sosial yang ada di dalamnya. Orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa solidaritas dan persatuan yang kuat. Kedua, proses mendirikan negara haruslah melalui proses suatu perjuangan. Kekuasaan negara merupakan bangunan kokoh yang tidak dapat digulingkan hanya sekali. Selain itu kekuasaan negara adalah kedudukan yang diimpikan dan memberikan kenikmatan bagi orang yang mendudukinya dalam berbagai seginya. Sehingga jarang sekali orang yang mau memberikanya secara sukarela tanpa melalui sebuah pertarungan yang alot. Karena itu untuk menghadapi perjuangan dan perlawanan

¹⁴ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadi Thoha., hlm. 589

¹⁵ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadi Thoha., hlm. 192

ini dibutuhkan kekuatan yang timbul dari solidaritas sosial.¹⁶

Negara dalam konsepsi Ibn Khaldun tidak dibangun atas perenungan filosofis atau berdasarkan atas ideal seharusnya masyarakat. Tapi lebih karena kebutuhan peradaban manusia yang selalu membutuhkan organisasi sosial dan kepemimpinan untuk melindungi eksistensi hidupnya. Organisasi sosialpolitik yang terwujud dalam negara ini adalah suatu keharusan sejarah. Di dalamnya terpaut antara tabiat peradaban dengan tujuan penciptaan. Allah menciptakan manusia menurut suatu bentuk yang hanya tumbuh dan mempertahankan hidupnya dengan bantuan makanan. Tuntutan memperoleh penghidupan ini mengharuskan manusia untuk hidup bermasyarakat dan membentuk organisasi sosial. Bagaimanapun minimnya kebutuhan manusia ia tetap membutuhkan kerja orang lain. Hanya dengan bekerjasama kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi. Bahkan menurut Ibn Khaldun, terbentuknya organisasi sosial ini telah digariskan Tuhan.

Tanpa adanya kerjasama antar manusia, hikmah penciptaan Tuhan untuk melestarikan dan memelihara kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud karena ras manusia pasti telah dibinasakan oleh alam dan serangan hewan. Tapi lebih dari itu, eksistensi peradaban tidak cukup hanya dengan berdasarkan organisasi sosial. Konflik antar sesama manusia tidak berhenti hanya dengan adanya organisasi

masyarakat. Konflik antar sesama lebih berbahaya bagi manusia, sebab strategi yang ia terapkan saat melakukan penyerangan dan pertahanan yang sudah diketahui oleh masing-masing individu. Karena itulah dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai kewibawaan dan mampu mengatur mereka. Pemimpin ini haruslah salah seorang dari mereka yang paling berpengaruh, mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi yang lain. Kekuasaan pemimpin inilah yang disebut dengan kedaulatan atau kekuasaan. Disamping itu, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa lama kelamaan seiring dan berjalannya waktu para penguasa negara akan semakin terpisah dari masyarakat dan menjadi kelompok teratas dalam masyarakatnya. Dengan demikian, Ibnu Khaldun secara nyata mengakui adanya konflik dan kelas dalam masyarakat yang merupakan bagian dari eksistensi sebuah negara.¹⁷

Bagi Ibnu Khaldun terdapat kaitan yang sangat erat antara peradaban dan negara serta kedaulatan. Akan terjadi saling meniadakan jika eksistensi salah satu di antaranya tidak ada. “Negara dan kedaulatan memiliki hubungan yang sama terhadap peradaban („umran), bagaikan hubungan bentuk dengan benda. Bentuk adalah wujud yang menjaga benda dengan perantara model tertentu dari struktur yang diwakilinya. Di dalam ilmu filsafat telah ditetapkan bahwa yang satu tidak dapat diceraiberaikan dengan yang lain. Negara tidak dapat terbentuk tanpa adanya peradaban („umran), sedangkan suatu peradaban („umran) tidak mungkin

¹⁶ Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992). hlm.161

¹⁷ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, hlm. 87

terwujud tanpa negara dan kedaulatan.¹³⁷ Karena menurut wataknya haruslah saling membantu, dan ini meminta adanya satu kewibawaan (Ar. al-wazi"). Kepemimpinan politik, yang didasarkan atas kekuasaan Syariat ataupun diraja, adalah satu keharusan sebagai pemegang wibawa itu. Inilah yang dimaksudkan dengan daulah. Oleh karena keduanya itu tidak dapat diceraikan, maka keharusan salah satunya itu akan mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana juga tak adanya yang satu akan mengakibatkan tak adanya yang lain itu.¹⁸

C. Hubungan Agama dan Negara Menurut Ibnu Khaldun

Secara umum, keterkaitan antara agama dan negara, di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya ada pada Islam. Salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari Islam ialah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang diilhaminya.

Agama dan negara memiliki dasar pijakan pada kenyataan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya, agama adalah kabar gembira dan peringatan. Sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama. Negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama

adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.¹⁹

Berangkat dari uraian tersebut, akan semakin jelas bahwa rumitnya hubungan agama dan negara terletak pada masalah definisi dan wilayah jangkauanya. Kesulitan untuk merumuskan hubungan agama yang sakral dengan entitas negara sebagai ciptaan manusia. Karena itu, dalam melihat hubungan agama dan negara pertama-tama keberadaan agama sendiri harus dilihat secara fenomenologis, sebagaimana pengalaman manusia tentangnya bukan entitas normatif dan abstrak.²⁰ Dengan perspektif fenomenologi agama, Amin Abdullah menjelaskan bahwa sebenarnya esensi keberadaan agama itu dibedakan menjadi dua kategori dengan cakupan yang berbeda, yaitu antara agama normatif dan agama historis.

Maksud dari agama normatif, adalah agama dalam wilayah transenden, milik Tuhan semata. Sedangkan agama dalam kategori historis adalah agama sebagaimana dipahami dan ditafsirkan manusia menurut setting lingkungan sosial dan kepentingan historisnya. Kebenaran absolut sebuah agama hanya ada dalam wilayah agama normatif, sementara makna kebenaran dalam agama historis bersifat relatif.²¹ Dengan tidak melepaskan dimensi Illahiahnya, agama harus dipahami sebagai bagian dari realitas sosial.

¹⁸ Osman Raliby, *Masyarakat dan Negara*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) hlm. 143

¹⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 191.

²⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat*, (Inggris-Jerman, Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 109-110

²¹ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. vi-viii.

Dengan mengikuti definisi Peter L. Berger, agama tidak lain adalah usaha manusia untuk membentuk suatu tatanan kosmos yang sakral dan trensidental. Kekuatan adiduniawi ini tidak berasal dari manusia, tapi berkaitan dengan kehidupannya.²² Tatanan kosmos yang dianggap sakral tersebut memberikan acuan kebenaran pada kehidupan manusia bahwa hidupnya terhindar dari kekacauan. Nomos (aturan) dari yang trensidental dipahami manusia sebagai negasi dari situasi dunia yang sarat dengan chaos (kekacauan). Peran sosial agama secara garis besar dibagi dua yaitu sebagai acuan pembangunan dunia dan sebagai pemelihara dunia.²³

Berkaitan dengan hubungan agama dan negara bagi Ibn Khaldun, dalam suatu negara agama tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara dan kerajaan. Ia merupakan kekuatan pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Tanpa agama kesatuan kelompok hanya didasarkan atas rasa kesatuan alamiah (ashabiyah) yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan. Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif rapuh dan diperlukan fondasi agama sebagai sandaran atas rasa kelompok tersebut. Hal ini terutama karena agama mampu

menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan individual dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial. Meski demikian, sekali dirusak atau dikotori agama akan kehilangan daya legitimasinya sebagai pengikat suatu kelompok. Pada akhirnya kelompok ini hanya mendasarkan diri pada kesatuan alamiah yang rapuh, cepat atau lambat akan membawanya pada kehancuran.²⁴

Menurut Ibn Khaldun, agama tetap berperan penting dalam proses perkembangan politik dan negara. Khusus bangsa Arab hanya persamaan ke-Tuhananlah yang membuat mereka berhasil mendirikan dinasti. Sebab menurutnya, bangsa Arab adalah bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. `Ashabiyah yang ada hanya didasarkan atas kesukuan atau kabilah yang tidak memungkinkan mendirikan sebuah dinasti karena sifat mereka yang kasar. Hanya karena agama yang dibawa oleh Nabi mereka akhirnya bisa dipersatukan dan dikendalikan wataknya.²⁵

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi saw. sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Nabi saw. bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara. Negara Madinah

²² Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta:LP3ES, 1991), hlm. 32-33.

²³ Riyo Muryanto, "Realitas Sosial Agama Menurut Peter L. Berger" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 232-234

²⁴ Ibnu Khaldun, *Muuqaddimah*, hlm 188

²⁵ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*..., hlm. 119

pimpinan Nabi itu, adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Dalam pandangan kaum kaum Muslim kekuasaan Nabi di Madinah tidak hanya dibimbing oleh kebijaksanaan manusiawi tapi juga oleh Wahyu Tuhan. Berpegang pada prinsip tersebut umat Islam pada masa berikutnya menjadikan periode Madinah ini sebagai tipe ideal pelaksanaan praktik politik karena di sanalah terdapat bukti konkret bagaimana ajaran Islam teraktualisasikan dalam sejarah.²⁶

C. Peran Agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun

Berbicara tentang peran agama dalam negara tentunya tidak terlepas dari peran para nabi sebagai pembawa agama. Para nabi adalah utusan Allah kepada manusia untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya dan untuk menunjukan kepada manusia jalan lurus. Dengan kata lain, para nabi sepanjang sejarah mempunyai peran dalam perkembangan masyarakat dan perjalanan kehidupan politik.²⁷ Untuk dapat mendiskusikan sebuah tatanan politik dan negara yang ideal dalam perspektif Ibnu Khaldun yang sistem dan strukturnya tidak lepas dari syariat Islam, maka dalam hal ini akan dijelaskan sedikit banyaknya tentang keterlibatan syariat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara.²⁸ Untuk itu disini penulis akan menjelaskan tentang peran agama dalam negara menurut Ibnu Khaldun diantaranya: pertama agama sebagai

pemersatu, kedua agama sebagai pendorong keberhasilan, dan ketiga agama sebagai legitimasi sistem politik.

1. Agama Sebagai Pemersatu

Ibnu Khaldun mengutarakan peran penting agama, khususnya Islam dalam kehidupan sosial politik, yaitu sebagai faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat. Bahkan, apabila kekuatan agama berdampingan dengan “ashabiyyah”, secara dialektik akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan integritas kekuasaan politik. Sebaliknya, jika agama dan “ashabiyyah” dipertentangkan akan mempercepat munculnya disintegrasi suatu negara. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun banggunya suatu negara berhubungan erat dengan superioritas suatu “ashabiyyah” terhadap yang lainnya.²⁹

Walaupun Ashabiyyah merupakan teori terpenting Ibnu Khaldun dalam kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan suatu negara, peran agama dalam negara justru terkadang jauh lebih besar daripada peran „Ashabiyyah itu sendiri, meskipun kajian utama Ibnu Khaldun bukanlah tentang agama Islam.³⁰ Dalam hal itu, yang dapat penulis analisa ialah agama sebagai indikasi dalam mempersatukan masyarakat. Sebab agama sebagai faktor pemersatu ini akan dapat mencapai kekuasaan politik yang olehnya “Ashabiyyah masyarakat telah dibarengkan dengan agama. Sumbangan ashabiyyah kepada negara amat besar dalam mewujudkan tatanan politik, akan

²⁶ Munir A. Mu’in, *Akar-akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 11

²⁷ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun....* hlm. 152

²⁸ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, hlm. 156.

²⁹ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun....*, hlm. 156

³⁰ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun....*, hlm. 156-157

tetapi peran agama di dalam negara lebih besar dalam upaya untuk perkembangan suatu negara dan masyarakatnya.

Ibnu Khaldun mengemukakan salah satu contoh konkret dari apa yang ia kemukakan adalah bangsa Arab. Sebagaimana diketahui, kekasaran watak dan kerasnya kehidupan membuat bangsa Arab sulit tunduk pada penguasa. „Ashabiyyah memang membuat mereka dapat eksis, tetapi agama justru mampu mengubah karakter mereka, bahkan membuat mereka mampu memerintah.³¹ Untuk menyatakan betapa besar peran agama tersebut, Ibnu Khaldun dalam sebuah pasal Muqaddimah yang berjudul “Bangsa Arab adalah suatu bangsa diantara kelompok umat manusia yang paling tidak cocok mempunyai kekuasaan politik” mengatakan sebagai berikut: “Penyebabnya ialah karena mereka lebih bersifat pengembara dibanding dengan kelompok manusia lainnya. Mereka lebih leluasa bergerak di padang pasir karena kesederhanaan dan kerasnya kehidupan mereka. Mereka tidak terlalu membutuhkan gandum dan hasil pertanian lainnya. Karena itu, mereka tidak mudah tunduk pada kekuasaan.”

Kemudian, apabila kondisi mereka semakin nyaman, dan memperoleh kekayaan dan kemewahan di atas batas yang dibutuhkan, mereka tenang dan tak ambil pusing. Dengan demikian mereka akan saling membantu di dalam berusaha memperoleh suatu di atas batas kebutuhan.³² Terkait dengan uraian di

atas, maka penulis dapat mengatakan bahwasanya nilai-nilai Islam mempunyai peran yang cukup signifikan dalam proses jatuh bangunnya negara. Adanya „ashabiyyah yang menjadi eksis dan berkembangnya suatu negara tidak terlepas dari peranan agama di dalamnya, malah sebaliknya agama lebih utama ketimbang peran „ashabiyyah. Dapat diambil contoh di atas, bahwa bangsa Arab terkenal dengan sifatnya yang keras, kasar, angkuh dan sebagainya itu yang membuat mereka sangat enggan patuh dan tunduk kepada pemimpin atau penguasa. Oleh sebab itu, peran agama telah dapat memperbaiki sifat-sifat mereka tersebut dan dapat menjadikan bangsa Arab sanggup untuk memerintah, walaupun pada awalnya dengan „ashabiyyahlah mereka dapat berperan penting dalam negara.

Ibnu Khaldun telah melihat kenyataan bahwa dalam mewujudkan kekuatan persatuan di kalangan rakyat, peranan agama Islam tidak dapat ditandingi oleh faktor apapun juga di dunia ini. Ia berpendapat bahwa peran agama sangatlah besar dalam mendirikan sebuah negara yang besar. Bahkan, pada salah satu subbab Muqaddimah ia menulis, “Setiap negara yang luas daerah kekuasaannya, pasti didasari oleh syariat Islam, baik yang seruan oleh seorang Nabi maupun seruan kebenaran.³³

Adapun penyebab yang demikian, menurut Ibnu Khaldun adalah adanya kekuasaan dan ashabiyyah, baik ashabiyyah yang berdasarkan Islam maupun „ashabiyyah yang dibangun oleh

³¹ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 157

³² Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 142

³³ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 158

kelompok yang lebih kuat dan lebih bersatu dalam mencapai tujuannya.³⁴ Terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu kekuatan kelompok pada masyarakat, kontribusi agama Islam tidak ada yang dapat mengalahkan posisinya dalam membangun sebuah negara yang luas dan besar, perlu disadari bahwa dengan nilai-nilai Islam baik itu yang datang langsung dari Nabi atau kebenaran risalah akan dapat memperluas daerah kekuasaan negara. Menurut Ibnu Khaldun, kerajaan yang luas dan memiliki kedaulatan didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran. Sebabnya ialah karena kekuasaan hanya bisa diperoleh dengan kemenangan, sedang kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukan lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuan. Maka hati umat manusia disatukan dan diseragamkan berkat pertolongan Allah dengan memeluk agama yang sama.³⁵ Untuk memperkuat argumennya, Ibnu Khaldun mengutip sebuah ayat al-Qur'an yaitu: "Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana." QS Al-Anfal (8): 63.

Jika kebenaran merupakan tujuan utama mereka, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka. Sebab, pandangan mereka telah sama dan tujuan yang mereka kejar juga satu dan sama sehingga membuat mereka bersedia berjuang sampai mati. Sebaliknya, golongan yang saling bertentangan, tidak bersatu, tidak mempunyai tujuan yang benar, tidak akan rela mati memperjuangkan sesuatu.³⁶ Mengenai hal ini Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut:

Rahasianya ialah bila hati telah terpenggil untuk melakukan kejahatan dan kecenderungan pada dunia, kecemburuan asli muncul dan perpecahan semakin meluas. Bila hati cenderung pada kebenaran, menolak dunia dan kebatilan, serta tunduk kepada Allah saja, maka tujuan akan menyatu. Kecemburuan pun menjadi lenyap dan pertentangan semakin berkurang. Kerja sama sarta persatuan menjadi lebih baik, karenanya daerah kekuasaan semakin meluas dan negara pun bertambah kuat. Terkait hal di atas, penulis berpendapat bahwa kedudukan nilai-nilai Islam di dalam sebuah negara telah terlihat jelas pada pencapaian kekuasaan. Dengan kebenaran yang di dapatkan oleh setiap kelompok atau golongan akan mampu menyatukan hati mereka karena mempunyai tujuan dan pandangan yang sama. Oleh karenanya, mereka akan berjuang dengan gigihnya dalam mempertahankan kebenaran walaupun harus siap untuk mati. Dengan demikian semangat ajaran Islam yang mereka miliki akan menciptakan rasa persatuan dan mampu melenyapkan

³⁴ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 159

³⁵ Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 192

³⁶ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 159

segala permasalahan dan ketidaksenangan antara kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya dan kemudian mengajak dan menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Semua ini berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah yang maha kuasa akan segala sesuatu untuk menyatukan hati manusia yang mempunyai semangat agama di dalam memperoleh kebenaran, serta kekuasaan negara akan bertambah luas dan kuat dengan sendirinya.

2. Agama sebagai Pendorong Keberhasilan

Selain berperan sebagai alat pemersatu, agama juga dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan. Menurut Ibnu Khaldun, meskipun kehidupan sosial dapat berlangsung tanpa adanya agama, dan politik dapat tegak tanpa aturan agama, agamalah yang berperan mendorong perkembangan kemajuan dan menjadikan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik.³⁷ Ibnu Khaldun dalam satu subbab dari Muqaddimah yang berjudul “Seruan Islam memperkokoh kekuatan „ashabiyyah yang dipupuk negara” sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, menyebutkan bahwa kesatuan tujuan dan semangat agama telah membawa keberhasilan tentara Islam pada periode awal penaklukan. Ia memberikan contoh peperangan Yarmuk dan Qadisiyah. Walaupun tentara Islam jumlahnya sedikit dengan peralatan perang yang sederhana jika dibanding dengan tentara Parsi dan Heraclius, kedua tentara itu tidak sanggup berhadapan

dengan tentara Islam, dan keduanya dikalahkan.

Tentunya keberhasilan dan kemenangan yang luar biasa tersebut sangat bertentangan dengan semua realita hukum peperangan. Menurut Ibnu Khaldun keberhasilan ini terjadi karena syari’at Islam.³⁸ Tiap negara mempunyai daerah tertentu yang tidak dapat dilampaui, negara harus membagi tentara dan angkatan bersenjataanya di antara kerajaan dan daerah perbatasan yang telah ditaklukan, untuk menjaga daerah itu dari musuh, menjalankan perintah kenegaraan, memungut pajak, menanam kewibawaan kepada rakyat, dan sebagainya. Kalau semua barisan tentara sudah terbagi habis dan tidak ada lagi cadangan yang tinggal, maka negara sesungguhnya sudah sampai pada batasnya. Tetapi selama masih ada barisan tentara yang belum terbagi untuk daerah-daerah perbatasan, maka daerah itu masih mempunyai kekuatan untuk merampas daerah yang ada di luar perbatasan, hingga ia mencapai batasnya.³⁹ Dulu kerajaan Persia yang ibu negaranya Ctesiphon, sewaktu Ctesiphon sudah berada di tangan orang Islam, maka seluruh kekuatan Persia dapat dilenyapkan, daerahdaerah yang jauh dari ibu kota negara dan belum jatuh ke tangan orang islam tidak ada gunanya bagi Jazdegerd. Sebaliknya, ingatlah kerajaan Byzantium yang ibu kota negaranya Konstantinopel. Sewaktu orang Islam mengalahkan Byzantium di Syria dan merampas daerah itu dari tangan mereka,

³⁷ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 161

³⁸ Ibnu Khaldun, Muqaddimah..., hlm. 199

³⁹ Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Toha..., hlm. 197-198

mereka mundur dengan utuh ke ibu kota negaaranya. Kerajaan mereka tetap berdiri di pusat, hingga Allah menentukan lenyapnya negara itu.⁴⁰ Besarnya suatu negara, luasnya daerah, dan panjang usianya, tergantung pada besar kekuatan penduduknya.

Sebabnya ialah karena suatu kedaulatan tidak dapat didirikan tanpa solidaritas. orang-orang yang punya solidaritas sosial itulah yang menjadi pelindung dan tinggal di kerajaan-kerajaan di seluruh pelosok negara itu. Negara yang memiliki lebih banyak suku dan orang-orang yang punya semangat dan solidaritas, maka negara itu akan lebih kuat dan akan lebih banyak punya kerajaan dan daerah kekuasaan yang jauh lebih luas.⁴¹ Sedangkan mengenai umurnya, juga tergantung kepada hal tersebut, sebab umur dari sesuatu yang baru tergantung kepada sifat daya tahannya. Sifat suatu negara tergantung kepada solidaritas sosialnya. Apabila solidaritas kuat, sifat akan kuat pula, dan umurnya pun akan panjang. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas itu tergantung kepada banyak dan besarnya jumlah.⁴²

Ibnu Khaldun, dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah, tidak sedikit pun mengabaikan peran agama. Bahkan, ia menekankan betapa penting agama bagi bangsa Arab dan kebangkitan mereka, dan juga menekankan pentingnya agama bagi negara. Ibnu Khaldun memproyeksikan hal

itu justru pada masyarakat nomad yang paling sukar ditundukkan, apalagi dipimpin oleh orang lain. Berkat peran agama mereka mampu meraih keberhasilan politik.⁴³ Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, syariat Islam tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan manusia tetapi juga sebagai pendorong akan keberhasilan dalam menjalankan kehidupan sosial menjadi terarah. Walau kata Ibnu Khaldun kehidupan sosial dapat berjalan tanpa dengan agama dan juga politik dapat ditegakkan pula tanpa aturan agama. Akan tetapi justru dengan syariat agamalah keberhasilan politik dapat dicapai sebagaimana dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah.

3. Agama sebagai Legitimasi Sistem Politik

Peran agama dalam sebagai legitimasi tataran sosial masyarakat dalam pemikiran Ibn Khaldun terlihat jelas dalam pembahasannya tentang negara. Negara sebagai konstruksi sosial manusia sebenarnya telah mampu untuk melegitimasi keberadaan dirinya sebagai organisasi sosial-politik yang mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan dan tujuan bersama. Namun negara masih tetap membutuhkan legitimasi dan kontrol tambahan dalam proses sosialisasi yang diambilkan dari agama untuk lebih mendukung eksistensi dan kebenarannya di hadapan masyarakat. Legitimasi agama sangat penting sepanjang berjalannya kekuasaan, mada masa awal agama merupakan kekuatan pemersatu `Ashabiyah, sementara pada

⁴⁰ Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 198

⁴¹ Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha..., hlm. 199

⁴² Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha..., hlm 200

⁴³ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, hal. 161-162.

tahap stabilisasi kekuasaan dan tahap akhir kekuasaan agama adalah sumber moralitas. Ketika semangat dan moralitas agama berdampingan dengan semangat `Ashabiyah maka akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian kesuksesan kekuasaan. Demikian pula jika agama dan `Ashabiyah dipertentangkan maka akan terjadi disintegrasi kekuasaan.

Peran penting agama sebagai legitimasi kekuasaan karena menurut Ibn Khaldun sendiri Islam sangat menaruh perhatian terhadap tatanan politik sesuai dengan misinya yang universal. Berbeda dengan agama lain, agama Islam tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan sendiri namun untuk komunitas universal. Islam menduduki posisi penting sebagai legitimasi sosial- negara. Agama memiliki kekuatan pemersatu yang melebihi kekuatan `Ashabiyah. Sebab agama mengajarkan seseorang untuk menjauhi sifat dengki dan permusuhan dan mengajak orang bersatu dalam kebenaran,⁴⁴ sebagaimana ditulis oleh Ibnu Khaldun berikut ini, “Sesungguhnya orang-orang Badui tidak akan dapat mencapai kekuasaan kecuali setelah adanya rona keagamaan baik dari kewalian ataupun pengaruh ajaran agama samawi secara umum. Keadaan ini terjadi karena sifat liar yang ada pada masyarakat Badui yang membuat mereka sulit tunduk dan dipimpin orang lain. Jarang sekali mereka yang mempunyai kesamaan pendapat. Namun ketika ada agama baik melalui kenabian ataupun kewalian yang memberi pengaruh pada diri mereka,

maka sifat sombong dan permusuhan akan hilang dari mereka.

Setelah itu akan menjadi mudah bagi masyarakat Badui untuk tunduk dan patuh membentuk satu kesatuan sosial. Hal ini terjadi karena agama telah menghilangkan sifat kasar dan melatih masing-masing individu untuk menahan perasaan cemburu dan dengki.”⁴⁵ Berkaitan dengan hal tersebut nampak jelas bahwa peran legitimasi agama dalam membina tatanan sosial-politik adalah sebagai pelengkap kekuatan Ashabiyah. Kekuatan `Ashabiyah saja tidak akan mencukupi untuk mendirikan suatu kekuasaan, sebab hanya mengandalkan kekuatan fisik. Tujuan terakhir Ashabiyah adalah tercapainya kedaulatan. Hanya suku atau kelompok yang memiliki ikatan solidaritas sosial paling kuatlah yang dapat mencapai penaklukan. Namun, kekuatan kelompok yang telah mencapai kekuasaan bisa jadi malah mengarah pada pertikaian dan konflik intern, baik itu karena ketidakadilan sistem dan perebutan tahta pemerintahan ataupun hasutan pihak luar. Karena itu diperlukan kekuatan tambahan untuk menutupi kekuasaan yang hanya disandarkan pada kekuatan `Ashabiyah ini dan disinilah peran penting dari agama. `Ashabiyah menjadi penting pada masa awal pendirian kekuasaan negara sedangkan kesuksesan dan stabilitas kekuasaan negara hanya terjadi ketika agama juga memainkan peran di dalamnya.⁴⁶ Agama sebagai legitimasi sistem politik, bagi dunia Islam sejak dulu

⁴⁴ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah Lil`alam ah Ibn Khaldun...*, hlm.120-121

⁴⁵ Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha..., hlm. 182-183

⁴⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun...*, hlm. 192- 193

sampai saat sekarang masih ada, baik dalam tetaran ide maupun dalam praktiknya. Bagi pemikir yang berpendirian bahwa Islam itu serba lengkap, agama dan negara harus menjalin hubunganyang menyatu, dan yang merindukan kembalinya sistem khilafah, maka agama akan tetap berperan sebagai legitimasi politik.⁴⁷

Keterlibatan agama dengan politik, dalam hal ini Islam dan negara, merupakan suatu fenomena sistem sosio-religi-politik tersendiri. Hal ini dimungkinkan karena Islam sejak periode awal adalah agama yang terlibat langsung dengan politik, agama dan negara merupakan satu kesatuan. Nabi sebagai pemimpin agama juga sekaligus sebagai kepala negara. Di masa Nabi, walau bukan dimaksudkan untuk melegitimasi sistem politik, agama telah berperan demikian. Berbagai kebijaksanaan politik tidak sekedar dilegitimasi bahkan dijustifikasi oleh ajaran agama, jika tidak oleh al-Qur'an setidaknya oleh hadis Nabi. Hal ini dapat dilihat dalam sistem politik Islam, antara lain persyaratan kepala negara, kontrak sosial, keharusan taat kepada pemimpin, majelis syura" sebagai pencerminan semangat demokrasi, dan lainnya.⁴⁸ Dari sini bisa diketahui bahwa Ibn Khaldun memandang agama dalam dua cara, disatu sisi ia memandang agama sebagai pandangan dunia dimana Islam merupakan sumber kebenaran, sumber hukum dan sumber moralitas yang diberikan Tuhan untuk diwujudkan dalam peradaban. Sementara

disisi lain, Ibn Khaldun memandang agama dalam kerangka legitimasi yang diberikan dalam mengatur tatanan sosial-politik. Agama pada poin kedua ini lebih dimaknai pada fungsinya sebagai daya pemersatu yang melengkapi dan memantapkan kekuatan `Ashabiyah. Dapat penulis katakan bahwa, selain syariat Islam sebagai faktor pendukung keberhasilan, agama Islam juga dapat berfungsi sebagai legitimasi sistem politik. Karenanya agama Islam telah disahkan menjadi bagian yang penting dalam sistem politik baik itu dilihat dari teori ataupun prakteknya. Dalam periode sejarah Islam telah dikatakan bahwa agama sudah mempengaruhi perpolitikan di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad yang merupakan seorang kepala negara merangkap sebagai kepala atau pemimpin agama.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun membagi peran agama menjadi tiga macam yaitu 1). Agama sebagai pemersatu, agama menjadi peran penting dalam kehidupan sosial politik yaitu faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat. Apabila agama berdampingan dengan solidaritas maka akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan integritas kekuasaan politik. 2). Agama sebagai pendorong keberhasilan, negara dan kekuasaan dapat berdiri tanpa agama, tetapi agamalah yang membawa negara dan kekuasaan itu kearah yang lebih baik. 3). Agama sebagai legitimasi sistem politik, agama dijadikan suatu landasan hukum yang harus ditaati dalam menjalankan perpolitikan atau pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun pemerintahan yang berdasarkan agama jauh lebih penting karena menurutnya pemerintahan seperti

⁴⁷ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 164

⁴⁸ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun..., hlm. 165-166



iniilah yang terbaik. Tanpa agama kesatuan kelompok hanya didasarkan atas rasa kesatuan alamiah (Ashabiyah) yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan. Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif rapuh dan diperlukan fondasi agama sebagai sandaran atas rasa kelompok tersebut. Hal ini terutama karena agama mampu menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan individual dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial.

Daftar Pustaka

- A. Rahman. 1992. Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibn Khaldun. Jakarta: Gramedia
- Abdullah, Amin. 1996. Falsafah Kalam di Era Posmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Khudairi, Zainab. 1987. Filsafat Sejarah Ibn Khaldun, terj. Ahmad Rofi Usmani. Bandung: Pustaka.
- A, Muin Munir. 2003. Akar-akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim. Bandung: Mizan.
- Bertens, K. 2002. Filsafat Barat, InggrisJerman. Jakarta: Gramedia.
- Khaldun, Ibnu. 1986. Muqaddimah. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
- L.Berger, Peter. 1991. Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial, Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Muryanto, Riyo. 1993. Realitas Sosial Agama Menurut Peter L. Berger dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia.
- Mushaf Al-Qur'an. 2009. Bandung: CV Media Fitra Rabbani.
- Raliby, Osman. 1997. Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara. Jakarta : Bulan Bintang.
- Syafiuddin. 2007. Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun. Yogyakarta : Gema Media. Zainuddin,